

Heru Budi Siapkan 2 Opsi Lokasi Penyelenggaraan HUT Ke-79 RI

JAKARTA (IM) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyiapkan dua opsi lokasi penyelenggaraan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia yakni Jakarta dan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Kami panitia HUT RI menyiapkan dua skenario, Jakarta dan IKN. Bisa dipakai dua-duanya," jelasnya kepada awak media di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/6).

Lebih lanjut, Ketua Panitia HUT ke-79 RI itu juga menjelaskan Presiden Joko Widodo akan meninjau langsung lokasi penyelenggaraannya.

"Besok pak presiden meninjau lokasi, tentunya ada beberapa hal terkait dengan HUT RI sesuai nanti arahnya seperti apa," jelasnya.

Sebelumnya, Heru mengatakan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia akan berlangsung di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur.

Ia menegaskan, hal itu sebagai awal tanda pemerintahan RI akan berjalan di sana, nantinya Presiden Joko Widodo yang meresmikan secara langsung.

"18 Agustus juga bapak presiden rencananya akan meresmikan masjid IKN dan itu kerangka awal untuk melakukan kegiatan pemerintahan

di IKN," jelasnya kepada awak media, Rabu (29/5) lalu.

Kepala Sekretariat Presiden Republik Indonesia itu juga menjelaskan rangkaian acara HUT RI dari awal Agustus hingga 17 Agustus.

"Mulai 1 Agustus ada kegiatan dzikir di IKN, berlanjut dengan acara-acara berikutnya, 14-17 Agustus," jelasnya.

Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan mengadakan acara seremonial untuk melepas status Daerah Khusus Ibukota (DKI), yakni dengan melepas bendera pusaka merah putih dan duplikat teks proklamasi dari Monumen Nasional (Monas) menuju IKN.

"Ada seremonial yang kira-kira nanti melepas bendera dan duplikat proklamasi dari Monas ke Istana Jakarta menuju Istana IKN," ujarnya.

Sebagai informasi, status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) yang disematkan pada Jakarta habis sejak 15 Februari 2024.

Berakhirnya status ibu kota seiring implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Namun demikian, Jakarta tetap menjadi Ibu Kota sampai Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan pemerintahan Ibu Kota terbit. ● yan

Hari Pertama PPDB Zonasi SMA Negeri di Depok Alami Gangguan Server

DEPOK (IM) - Hari pertama jalur zonasi Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA Negeri di Kota Depok, Jawa Barat mengalami error atau gangguan server, sehingga para calon siswa gagal untuk mendaftar.

"Mau daftar SMA Negeri jalur zonasi sulit diakses. Nggak masuk-masuk," kata orang tua calon siswa SMA Negeri 1 Depok Agung di Depok, Senin (3/6).

Ia mengatakan sudah mencoba mendaftar di rumah, ternyata tidak bisa masuk-masuk. Kemudian, mendatangi sekolah untuk mendaftar ternyata sama saja.

"Selalu gagal daftar. Nah, ternyata tidak anak saya saja yang gagal daftar. Tapi, teman-temannya yang mau daftar juga sama,

tidak bisa diakses," tuturnya.

Sementara itu, Humas SMA Negeri 1 Depok, Teguh mengatakan pendaftaran PPDB jalur zonasi dibuka mulai hari Senin. Ia mengatakan selama dibuka pendaftaran PPDB server daftar mengalami kendala atau error.

"Hampir semua tidak bisa, karena hari ini dibuka pendaftaran PPDB jalur zonasi dan afirmasi jalur siswa keterangan keluarga ekonomi tidak mampu atau KETM," tuturnya.

Hal sama juga dikatakan Kepala KCD Wilayah II, Asep Sudarsono. Ia menginformasikan server jaringan PPDB hampir semua sekolah di Bogor dan Depok mengalami kendala, karena ada gangguan di hari pertama pendaftaran. ● yan

TERKAIT PENURUNAN REMUNERASI

Nakes di RS Duren Sawit Jaktim Berunjuk Rasa

JAKARTA (IM) - Puluhan tenaga kesehatan (nakes) Rumah Sakit Duren Sawit, Jakarta Timur berunjuk rasa di halaman rumah sakit pada Senin, 3 Juni 2024.

Para nakes ini berunjuk rasa terkait kebijakan penurunan remunerasi. Sementara di waktu bersamaan, jumlah pelayanan pasien di rumah sakit tersebut diklaim meningkat.

Dalam poster yang diperlihatkan, para nakes meminta transparansi terkait remunerasi.

"Jumlah pasien meningkat, remunerasi menurun, kok bisa?" tulis salah sebuah poster yang dibawa seorang pengunjung rasa.

Terpisah, Plt. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Ani Ruspitawati menduga ada komunikasi yang keliru sehingga para nakes berunjuk rasa.

"Ada miss komunikasi. Kemungkinan, ini saya juga lagi ke sana melihat, mungkin komunikasinya

aja yang kurang bagus, jadi saya mau lihat," kata Ani melalui sambungan telepon pada Senin (3/6).

Ani mengaku belum tahu pemicu pasti unjuk rasa tersebut.

"Ya saya juga enggak tau persis masalahnya, saya masih mau melihat. Tapi ya, kemungkinan karena komunikasinya kurang kali ya," jelasnya.

Lebih lanjut, ia memastikan pemicu unjuk rasa dari masalah internal. Ani menegaskan, pelayanan rumah sakit tetap berjalan.

"Masalah internal, dan akan kami diskusikan. Para dokter tetap melakukan pelayanan," pungkasnya.

Sebagai informasi, remunerasi adalah hadiah bagi para pegawai dalam bentuk pembayaran gaji ataupun upah termasuk tunjangan, seperti misalnya rencana medis, mobil perusahaan, program pensiun, bonus, hingga insentif tunai. ● yan

4 | Metropolis

FOTO: ANT



RAKER KOMISI X DENGAN KEMENPORA BAHAS NATURALISASI

Pemain naturalisasi Timnas sepak bola Indonesia Calvin Ronald Verdonk (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/6). Raker tersebut membahas permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia (naturalisasi) kepada dua atlet sepak bola keturunan Indonesia yakni Jens Raven dan Calvin Ronald Verdonk.

RK: Jakarta Takkan Banyak Berubah Usai Ibu Kota Pindah ke IKN

Perpindahan status Ibu Kota dari Jakarta ke IKN tidak serta merta langsung mengubah kondisi Jakarta yang sudah seperti saat ini. Merujuk pengalaman negara lain yang Ibu Kotanya berpindah, perubahan itu bisa terjadi mencapai puluhan tahun, bahkan ada juga yang mencapai 100 tahun seperti Washington DC, Amerika Serikat.

Ibu Kota pindah ke IKN di Kalimantan Timur. RK meyakini dalam waktu dekat, Jakarta tak akan mengalami banyak perubahan pasca-perpindahan Ibu Kota.

Hal tersebut disampaikan RK saat menjadi pembicara pada acara Urban Dialogue dengan tema Jakarta Menuju Kota Global: Tantangan dan Solusi di Jakarta, Senin (3/6).

"Jadi, menurut saya, belum terlalu super kritis, seolah-olah IKN akan mengubah Jakarta," kata RK dalam diskusi tersebut, Senin (3/6).

RK melanjutkan, perpindahan status Ibu Kota dari Jakarta ke IKN tidak serta merta langsung mengubah kondisi Jakarta yang sudah seperti saat ini.

Merujuk pengalaman negara lain yang Ibu Kotanya berpindah, perubahan itu bisa terjadi mencapai puluhan tahun, bahkan ada juga yang mencapai 100 tahun seperti Washington DC, Amerika Serikat.

"Jakarta itu tidak akan banyak perubahan dari sisi aktivitas karena Washington DC saja butuh 100 tahun. Jadi, IKN itu dalam jangka waktu lima atau 10 tahun tiba-tiba ada perubahan seperti apa yang dikhayalkan. Tidak sesederhana itu," ujarnya.

Mantan Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 itu memandang, diskusi terkait tantangan Jakarta setelah tidak menjadi Ibu Kota Negara baru menarik dilakukan ketika masuk pada 2030 atau 2045. "Kalau diskusi ini terjadi pada 2030 atau 2045, kekhawatiran itu bisa dibahas lebih jauh," katanya.

Ia menambahkan bahwa tantangan Jakarta lima tahun ke depan yaitu dengan tetap memperhatikan krisis iklim dan kondisi kehidupan masyarakatnya.

Apalagi, kata RK, dari data yang ada hampir 60 persen penyakit yang diderita warga Jakarta yaitu terkait permasalahan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) karena faktor udara dan polusi.

"Sekarang lima tahun ke depan Jakarta harus merespon krisis iklim dan juga kehidupan masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyebutkan perayaan HUT ke-79 RI yang akan diselenggarakan di IKN menjadi momentum pelepasan status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Heru juga menyebutkan akan ada seremonial khusus untuk meresmikan perubahan status Jakarta dan IKN Agustus nanti.

"Ada seremonial yang kira-kira nanti melepas bendera dan duplikat proklamasi dari Monas ke Istana Jakarta, dari Istana Jakarta nanti menuju ke Istana IKN," katanya di Jakarta, Rabu (29/5).

Heru menyebutkan, peralihan Ibu Kota negara itu menjadi momentum tepat untuk melepaskan status DKI Jakarta, sebagaimana komitmen dari pemerintah pusat. ● yan

IBU KOTA PINDAH KE IKN

RK Usul Istana Merdeka Jakarta Jadi Museum atau Kantor Pemprov Jakarta

JAKARTA (IM) - Semenaik Ibu Kota resmi pindah ke Kalimantan Timur dan IKN dibangun, banyak yang mempertanyakan nasib gedung-gedung di Jakarta yang kemungkinan akan banyak yang kosong. Ternyata pemerintah juga sempat membahas hal ini, terutama mengenai alih fungsi Istana Merdeka.

Kurator IKN, Ridwan Kamil membenarkan perpindahan pusat pemerintahan ke IKN akan berdampak pada menjamurnya gedung kosong terutama bekas kantor pemerintahan.

"Sekarang ada Undang-Undang IKN sudah move on aja beradaptasi. Itu keputusan politik mahal. Nanti akan ada puluhan dan ratusan gedung kosong," kata Ridwan Kamil saat hadir di acara Urban Dialogue di Jakarta pada Senin (3/6).

Dia mengungkapkan sempat berbicara dengan Presiden Joko Widodo

mengenai usulan mengubah Istana Merdeka menjadi museum atau kantor pemerintahan Jakarta yang baru.

"Semper saya bilang, Pak Jokowi nanya, 'Kang Emil Istana Merdeka mau diapain kalau kita pindah? Museum aja?' Yah satu opsi pak, atau jadi Kantor (Pemerintahan) Jakarta berikutnya Pak, bisa juga. Kalau memang Ibu Kota pindah," lanjutnya.

Dia menyebut jika dibandingkan Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat, kantor pemerintahan Jakarta jauh lebih kecil sehingga bisa memanfaatkan Istana Merdeka sebagai lokasi kantor yang baru. Lebih lanjut, dia mengungkapkan perpindahan itu akan mendapat dua reaksi yakni disukai dan tidak disukai. Meskipun rencana perpindahan dari Jakarta ke IKN belum dimulai, tetapi untuk beberapa tahun ke depan pun selama IKN masih dibangun tidak akan ada perubahan di Jakarta

terutama dalam hal aktivitas.

"Jakarta nggak akan banyak perubahan dari sisi aktivitas. Untuk jadi kota yang sukses, contohnya Washington DC butuh 100 tahun. Jadi IKN jangan berharap 5 sampai 10 tahun dapat berubah signifikan," ujarnya.

Menurutnya, IKN untuk sampai menjadi kota yang sukses maka perlu ada insentif bagi yang tinggal di sana. Insentif di sini berupa fasilitas kelengkapan fasilitas penunjang termasuk tempat rekreasi.

"Maka saya sampaikan ke pak Presiden, IKN mau sukses, kita bikin insentif orang mau buat tinggal di IKN. Bukan hanya PNS-nya, tapi orang-orangnya, apakah ada bisnisnya, ada universitasnya, ada rekreasinya, agar orang mau main dan spending investasi dan tinggal di sana. Kalau tidak, dia hanya jadi government center namanya, isinya PNS," sebutnya. ● yan

535 Penerima Bansos di Jakarta Dicoret

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 535 orang dikeluarkan dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) pemenuhan kebutuhan dasar (PKD) tahun 2024.

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari mengatakan ratusan orang yang dicoret dari penerima bansos Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ) itu dianggap tidak lagi memenuhi syarat.

"Saat ini masih dalam proses verifikasi dan inventarisasi data dokumen sanggahan. Data penerima bantuan sosial yang dipastikan dicoret karena tidak memenuhi syarat terdiri dari KLJ sebanyak 498 orang, KPDJ 34 orang, dan KAJ 3 orang," kata Premi dalam keterangannya, Senin (3/6).

Ia menjelaskan, hal ini terjadi setelah adanya pembersihan dan pemadanan data calon penerima bansos PKD.

Pada tahap pertama, Dinsos DKI memadankan data calon penerima bansos PKD dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) berstatus layak pada sistem Kementerian Sosial RI.

Kedua, memadankan data melalui web service Kependudukan Kemendagri untuk mendapatkan status meninggal dunia dan pindah ke luar Provinsi DKI Jakarta. Kemudian, Dinsos DKI juga melakukan pemadanan dengan data Badan Pendapatan

Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta untuk mengetahui kepemilikan aset, seperti kepemilikan kendaraan mobil dan nilai jual objek pajak (NJOP) di atas Rp1 miliar.

Terakhir, Dinsos DKI melakukan pemadanan dengan data warga binaan sosial (WBS) panti sosial. Dalam menentukan prioritas penerima bantuan sosial tersebut, kami juga memadankan data calon penerima dengan data registrasi sosial ekonomi (reg-sock) untuk mendapatkan status peringkat kesejahteraan dalam bentuk desil.

"Setelah seluruh proses pembersihan dan pemadanan data selesai, penerima bantuan sosial eksisting (desil 1-4) yang dinyatakan masih layak berdasarkan hasil padanan tersebut, ditetapkan kembali sebagai penerima bantuan sosial," ucap Premi.

Adapun, jumlah penerima bansos eksisting yang ditetapkan kembali sejumlah 63.698 orang, yang terdiri dari 53.709 penerima KLJ, 6.626 penerima KPDJ, dan 3.363 penerima KAJ.

Namun, terdapat 972 calon penerima bansos tahap 1 yang belum dapat dinyatakan layak menerima bantuan, terdiri dari KLJ sebanyak 696 orang, KPDJ 93 orang, dan KAJ 183 orang.

"Hal tersebut lantaran mereka terindikasi tidak memenuhi kelayakan dalam padanan data Kemensos RI, WBS panti sosial, Bapenda, dan web service Kependudukan Kemendagri," pungkasan Premi. ● yan



KONFERENSI PERS JELANG INDONESIA OPEN 2024

Pebulu tangkis tunggal putra Jonatan Christie (kedua kanan), pebulu tangkis tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung (kanan), pebulu tangkis ganda putri Apriyani Rahayu (kedua kiri) dan Siti Fadia Silva Ramadhanti (kiri) berfoto bersama saat konferensi pers jelang turnamen bulutangkis Indonesia Open 2024 di Istora Senayan, kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (3/6). Turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2024 yang masuk dalam kategori HSBC BWF World Tour Super 1000 itu diikuti 241 atlet dari 22 negara yang akan berlangsung pada 4-9 Juni 2024.